

DAFTAR NAMA- NAMA
WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN
SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

No.	Nama	No. SPPT	Alamat Objek Pajak	Jumlah PBB Terutang	Besarnya Pengurangan yang diinginkan (%)
1	2	3	4	5	6
1.				Rp.	
2.				Rp.	
3.				Rp.	
4.				Rp.	
5.				Rp.	
6.				Rp.	
7.				Rp.	
dst				Rp.	

*) Coret yang tidak perlu

Kepala desa/ Kelurahan
Kecamatan
Pimpinan Organisasi *)

Nama Jelas

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Daerah cq Kadipenda TK
2. Camat

Lampiran 1

..... Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun Pajak

Kepada
Yth. Menteri Keuangan RI
Cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB
Melalui
Kadipenda TK
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepala Desa/Lurah/Pimpinan :

Organisasi *)
 Propinsi/Kab/Kodya *) :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB tahun Pajak sehubungan dengan *)

1. Terjadinya bencana alam,
2. Sebab - sebab yang luar biasa,
3. Alasan lain

Demikian untuk menjadi dimaklumi dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala desa/ Lurah/
 Pimpinan Organisasi *)

(Nama Jelas)

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Daerah cq Kadipenda TK
2. Camat

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
 TANGGAL :

No.	Nama	No. SPPT	Alamat Objek Pajak	Jumlah PBB Terutang	Besarnya Pengurangan yang diinginkan (%)
1	2	3	4	5	6
1.				Rp.	
2.				Rp.	
3.				Rp.	
4.				Rp.	
dst				Rp.	

PETUGAS

1.
 NIP
2.
 NIP
3.
 NIP
4.
 NIP

BERITA ACARA PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

Pada hari ini : Tanggal tahun 199.....
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Nama : | Jabatan : |
| 2. Nama : | Jabatan : |
| 3. Nama : | Jabatan : |
| 4. Nama : | Jabatan : |

Selaku petugas yang ditunjuk/ diperintahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK No tanggal dan No. tanggal telah melaksanakan penelitian terhadap objek pajak/kondisi para wajib pajak :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Daerah Tk. II :
Jumlah :
Ketetapan
Tahun Pajak :

Berdasarkan penelitian administrasi diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian pengurangan.

MENGETAHUI
KADIPENDA TK,

(Nama Jelas)
NIP :

PETUGAS

1.
NIP
2.
NIP
3.
NIP
4.
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK
PERSEORANGAN SECARA KOLEKTIF
SEBELUM SPPT DITERBITKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal
nomor dari Desa/Kelurahan/Organisasi *)
.....
- memperhatikan : Hasil penellitian administrasi permohonan pengurangan pajak sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Nomor :
.....
- Menimbang : Bahwa besarnya Pajak yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 158/KMK.04/1991.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/1994 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 158/KMK.04/1991.
4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK
PERSEORANGAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN.

Pasal I

- (1) Mengabulkan / Menolak Seluruh / Sebagian Permohonan *) Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan terutang kepada : Atas nama wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.
- (2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) diatas, maka besarnya PBB terutang sebagai
berikut/sebagaimana daftar terlampir *) :
- a. Pajak terutang menurut SPPT daftar terlampir Rp.
- b. Besarnya pengurangan (.....% x Rp) daftar Rp.
terlampir
- c. Jumlah pajak terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.
(.....)

Pasal 2

Dengan terbitnya keputusan ini, maka SPPT yang diterbitkan merupakan SPPT yang tidak dapat
dimohonkan pengurangan lagi.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN :

DI
PADA TANGGAL :

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah DJP
di

A.N. MENTERI KEUANGAN R.I.
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan R.I.
No. :

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG TELAH DIPUTUSKAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Dati II :
Tahun Pajak :
Alasan Permohonan : 1. bencana alam,
*)
2. Sebab lain yang luar biasa
3. Alasan lain

No. Urut	Nama Wajib Pajak	NOP	Ketetapan Sebelum Pengurangan (Rp)	Besarnya Pengurangan		Ketetapan PBB setelah diberikan pengurangan
				%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah						

keterangan : *) Coret yang tidak perlu

A.n. MENTERI KEUANGAN R.I.
KEPALA KP PBB

.....
NIP